PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Dst.....

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Lembar Pengujian Konsekuensi ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun yang tercantum dalam lampiran Lembar Pengujian Konsekuensi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di Pamekasan,
Pada tanggal 31 Agustus 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pamekasan
selaku Atasan PPID

MASRUKIN, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691104 199003 1 005

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 04 bulan Septembertanggal 31 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pamekasan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Profil bupati dan wakil bupati serta seluruh pejabat structural aselon 2 & 3 di Kabupaten Pamekasan	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 4 dan 5 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2		Mengungkap data pribadi /PNS yang bersifat rahasia	selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis
Surat keputusan tentang pengangkatan Bupati, wakil, sekda, dan seluruh pejabat di Pamekasan	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 5 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan		Mengungkap data pribadi /PNS yang bersifat rahasia	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis
Surat keputusan tentang pengangkatan/penunjukan PPID dan atasan PPID di Pamekasan	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 5 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Data perihal jabatan dalam instansi dan jabatan dalam surat keputusan	Data pribadi/ data perseorangan dan Mengungkap data PNS yang bersifat rahasia	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis

Dokumen lengkap LHKPN dan LHKAN	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 3 dan 5 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Ikhtisar LHKPN dapat di askes pada portal web KPK yang tersemat pada website pemkab	Data yang Mengungkap data PNS yang memuat Riwayat Pendidikan formal dan non formal bersifat rahasia; LHKAN tidak dapat diberikan karena memperlihatkan kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis
Ingin mencetak KK yang ber QR (barcode)	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22, pasal 7 ayat 1, dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 3 huruf h dan pasal 36 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 12 nomor 1 dan 2 huruf a	Nama dari pemohon harus tercantum didalam Kartu keluarga atau sesuai dengan legal standing tertentu	Mengungkap data pribadi /PNS yang bersifat rahasia	Ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

	PERMENDAGRI No. 95 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 2019 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan			
Salinan Lengkap LHKPN Terbaru Kepala Disdikbud Salinan Lengkap LHKPN Terbaru Kepala Dinkes	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 5 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf H nomor 4 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Hanya dapat mengakses LHKPN yang telah diumumkan oleh website resmi KPK	Tidak dapat memberikan data LHKPN lengkap karena bersifat rahasia	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis
Data pengguna yang pernah mengajukan informasi selama setahun	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 3 huruf h dan pasal 36	Hanya dapat diberikan jumlah pemohon informasi publik	Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PP nomor 82 tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pasal 15 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 1 nomor 12 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan			

Data penerima biasiswa santri pada TA. 2020,2021 dan 2022	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 4 dan 5 Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 4 huruf e Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Rekap/ iktisar pelaksanaan kegiatan beasiswa santri menyangkut jumlah penerima manfaat dan jumlah nominal keseluruhan serta wilayah umumnya.	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia - Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	- Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis - Data pribadi anak Bersifat spesifik
Data peserta yang telah ikut pelatihan WUB pada TA. 2020,2021 dan 2022	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 4 dan 5 Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2, dan pasal 79 ayat 1 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Hanya dapat diberikan rekap jumlah orang, jumlah per wilayahnya, dan tujuan pelatihannya	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Data Lengkap Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2008	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf B Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Dapat diberikan dengan cara menghubungi langsung helpdesk KPU Kabupaten Pamekasan	Identitas lengkap para calon bupati dan wakil bupati	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Nama, no hp,email orang yang pernah mengajukan formulir permohonan informasi	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 3 huruf h dan pasal 36 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PP nomor 82 tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pasal 15 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 1 nomor 12 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2	Hanya dapat diberikan jumlah pemohon informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan			
Permohonan data tentang perijinan	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf B Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Permintaan Data PDG dan Ijin Operasional Hotel, RSU, RS Swasta, Tempat Pelayanan Kesehatan pada jaminan Kesehatan Nasional, Losmen, rumah kos dan gedung negara di seluruh Pamekasan	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 36 ayat 2 huruf c tentang Permendagri nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kemendagri dan pemda Perbup nomor 54 tahun 2023 tentang pasal 10 ayat 3 dan lampiran VI (perekonomian) klasifikasi nomor 503	penyediaan jenis informasi paling sedikit terdiri atas data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang disediakan untuk publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan			
Jumlah semua anggota personel yang PNS dan Non PNS Name By Address serta tempat penugasannya	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 4 dan 5 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan		Mengungkap data PNS yang bersifat rahasia	selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis
Data Pernikahan	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 3 huruf h dan pasal 36 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 5 Undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 57 nomor 4 dan 5 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Hanya jumlah nya saja	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis

	Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan			
Data KDRT	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 5 Undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 57 nomor 4 dan 5 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Hanya jumlah nya saja	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis
Permohonan keterangan status hukum Sdr. Baihaki (KADES Kacok Kec. Palengaan)	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan		- Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Ditetapkan Paling lama 30 tahun

	Informasi Publik pasal 17 huruf a nomor 1, 2, dan 5 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan		- Menghambat Proses Penyelesaian sengketa/penegak Hukum Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya	
Ijin operasional puskesmas yang sudah mati	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf B Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Hanya data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang disediakan untuk publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Permohonan Data Penerima BLT Buruh Tani & PabriK Rokok DBHCHT TA. 2022	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan	Hanya dapat diberikan rekap jumlah orang dan nilai bantuannya	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

SPJ Name by Address program beasiswa santri	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h nomor 4 dan 5 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 22 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi seseorang atau dengan persetujuan tertulis
Data surat ijin berusaha dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009 Kearsipan		Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebegaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	amf Rachmawan Ejah	PPID UTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	TAUFIK ARIS SAPUTRA	AHLI HUKUM PPID UTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3	ZAITU	AHLI HUKUM PPID UTAMA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4	NORUL Kavariyah.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
5	WILDAN TAUFIQUR R	PPID PELAKSANA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
6	Nur Istiqa	PPID PELAKSANA	DINAS KESEHATAN	
7	MOH. Fahmi	PPID PELAKSANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
8	Ridawati	PPID PELAKSANA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
9	Irwan AC	PPID PELAKSANA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
10	IWAN P.	PPID PELAKSANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	
11	A. Hafidzi	PPID PELAKSANA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

12	IKA YULIA R.	PPID PELAKSANA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
13		PPID PELAKSANA	BAGIAN ORGANISASI	
14	KUSNO	PPID PELAKSANA	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
15	Imam Ansori	PPID PELAKSANA	INSPEKTORAT	
16	Endang Retnyana, S.Kom	PPID PELAKSANA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
17	Moh Syaiful Rahadha	PPID PELAKSANA	KOMISI PEMILIHAN UMUM	
18	Agus. S Hidayat	PPID PELAKSANA	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pamekasan
selaku Atasan PPID

MASRUKIN, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691104 199003 1 005